

## KONTRIBUSI WISATA HUTAN MANGROVE TONGKE-TONGKE TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SEKTOR PARIWISATA KABUPATEN SINJAI

**Karmansyah \*<sup>1</sup>, Ahmad Firman**

<sup>1</sup>Mahasiswa STIE Nobel Jurusan Manajemen (S1)

<sup>3</sup>Jurusan Manajemen, STIE Nobel Indonesia Makassar

e-mail: \* <sup>2</sup>[firmansyah25@yahoo.com](mailto:firmansyah25@yahoo.com)

### **Abstrak**

*Penelitian bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi tempat wisata Hutan Mangrove Tongke-tongke terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor pariwisata di Kabupaten Sinjai.*

*Sumber data adalah data sekunder dari buku-buku dan penelitian sebelumnya, Badan Pusat Statistik dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.*

*Hasil penelitian menunjukkan kontribusi wisata hutan mangrove tongke-tongke terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata di Kabupaten Sinjai pada tahun 2017 sebesar 25,7 %, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 69,4 %. Kontribusi hutan mangrove tongke-tongke terhadap pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018 dengan selisih sebesar 43,7 %.*

**Kata kunci :** *Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke, Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata*

### **Abstract**

*The research aims to find out how much the contribution of the Tongke-tongke Mangrove Forest tourist attractions to the Regional Original Revenue (PAD) of the Sinjai District tourism sector.*

*Data sources are secondary data from books and previous studies, the Central Statistics Agency and the Tourism and Culture Office of Sinjai Regency. This research is a descriptive study, with more descriptive nature of the results of observations and documentation studies. The data that has been obtained will be analyzed qualitatively and described in descriptive form.*

*The results showed the contribution of mangrove forest tourism to the original income (PAD) of the tourism sector in Sinjai District in 2017 amounted to 25.7%, while in 2018 amounted to 69.4%. The contribution of the tongke-tongke mangrove forest to the regional original income has increased from 2017 to 2018 with a difference of 43.7%.*

**Keywords:** *Tongke-Tongke Mangrove Forest Tourism, Local Revenue of the Tourism Sector*

## **PENDAHULUAN**

Otonomi daerah saat ini memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah praktis dan kreatif untuk melaksanakan rencana aksi pertumbuhan untuk meningkatkan potensi regional adalah sumber pendapatan ekonomi dan, pada saat yang sama, insentif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Salah satu bidang utama perencanaan pembangunan yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah pertumbuhan sektor pariwisata, yang

merupakan salah satu sektor utama pertumbuhan ekonomi daerah sesuai dengan potensinya. Pariwisata adalah kumpulan elemen terkait yang membentuk pariwisata, terdiri dari wisatawan, tujuan wisata, transportasi, industri dan sebagainya. Pariwisata adalah salah satu sumber devisa di Indonesia. Begitu banyak bentuk dan jenis pariwisata yang menyebar dari Sabang ke Merauke, seperti wisata ekonomi, sosial, dan budaya. Indonesia juga kaya akan wisata budaya selain memelihara jutaan objek wisata alam,

seperti yang ditunjukkan oleh banyak benda bersejarah dan keanekaragaman seni.

Pembangunan nasional di setiap sudut dunia harus dilakukan secara adil dan wajar, dan seluruh bangsa harus benar-benar merasakan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan dan nilai-nilai kemerdekaan Indonesia. Kegiatan konstruksi juga dilakukan di tingkat regional di berbagai sektor seperti industri pariwisata, yang memperhitungkan potensi dan prioritas masing-masing daerah. Salah satu alasan mengapa sektor pariwisata Indonesia perlu dikembangkan lebih lanjut adalah karena berkurangnya posisi minyak dan gas sebagai penghasil devisa, sektor pariwisata telah menjanjikan potensi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di masa depan, disamping itu juga dapat meningkatkan pendapatan pajak negara.

Menurut Subagyo (2012), Pengembangan pariwisata yang mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan memperhatikan hal-hal berikut : 1). Beberapa peraturan perlu ditetapkan yang mendorong peningkatan kualitas layanan pariwisata dan perlindungan iklim pariwisata, bukan untuk kepentingan pihak lain. Selain itu, tindakan tegas harus diambil bagi mereka yang melanggar aturan yang ditetapkan; 2). Administrator pariwisata harus melibatkan masyarakat setempat. Ini penting karena pengalaman di banyak daerah tujuan wisata (DTW) tidak termasuk masyarakat lokal sama sekali, akibatnya masyarakat sekitar tidak memiliki kontribusi ekonomi; 3). Kegiatan promosi harus luas, serta meluncurkan kampanye dan kunjungan program ke Indonesia tahun sebelumnya seperti yang dilakukan sebelumnya, kegiatan promosi juga harus dilakukan dengan mengembangkan sistem informasi yang andal dan membangun kerja sama yang kuat dengan pusat informasi pariwisata di negara-negara dengan potensi.

Ada kebutuhan besar untuk keterlibatan masyarakat dalam pertumbuhan pariwisata. Keterlibatan publik adalah ekspresi dari minat dan kepedulian dalam kegiatan pembangunan, dan tanggung jawab publik untuk nilai pembangunan yang ditujukan

untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Alfitri (2011)

Kabupaten Sinjai memiliki potensi yang cukup menjanjikan baik laut, darat dan pegunungan dengan luas 223 km<sup>2</sup> dan memiliki populasi 238.099 orang yang menyimpan artefak pariwisata potensial yang sangat menjanjikan sebagai sumber pendapatan, maka sektor pariwisata diharapkan dapat berkontribusi dengan peningkatan pendapatan lokal (PAD).

Berbagai kebijakan yang diadopsi oleh suatu negara dalam mempromosikan pertumbuhan dan keberlanjutan perjalanan & pariwisata (T&T), yang akan memberikan daya tarik wisata dan daya saing di antara negara-negara dunia. Indonesia berada di peringkat kelima puluh di dunia pada indeks TTIC dan keempat di ASEAN setelah Singapura, Malaysia dan Thailand (*World Economic Forum, 2015*).

Pertumbuhan di sektor pariwisata akan berkembang jika masyarakat setempat akan mengambil atau terlibat dalam peran yang lebih aktif. Agar masyarakat yang lebih luas dapat terlibat lebih jauh dalam pertumbuhan pariwisata, masyarakat perlu diberi pemahaman tentang apa itu pariwisata, serta keuntungan dan keuntungan yang bisa diperoleh. Selain itu, masyarakat juga perlu mempelajari isu-isu yang dapat membahayakan keberadaan pariwisata tersebut.

Pengembangan di sektor pariwisata perlu ditingkatkan dengan mengembangkan dan menggunakan sumber daya pariwisata nasional dan regional dan potensi untuk menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan devisa atau pendapatan lokal, memperluas dan menyamakan peluang bisnis dan lapangan kerja, terutama untuk masyarakat lokal

Kabupaten Sinjai sendiri merupakan wilayah yang termasuk dalam kategori pertumbuhan sementara hampir semua sektor tumbuh dan berkembang sedangkan Kabupaten Sinjai memiliki sektor unggulan yang fokus pada industri pertambangan dan pertanian. Sedangkan sektor wisata kurang tersentuh dan dibangun sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten Sinjai, olehnya itu

masa depan sektor pariwisata tidak dapat optimal. Seharusnya Kabupaten Sinjai juga mengembangkan sektor wisata karena Kabupaten Sinjai memiliki berbagai kelebihan dan keunggulan dibandingkan dengan Kabupaten lain. Salah satu kelebihan yang dimiliki Kabupaten Sinjai adalah karena keadaan wilayah berada di bawah kaki Gunung Bawakaraeng sehingga memiliki pemandangan alam yang cukup indah dan ada beberapa wilayah pesisir yang memiliki pantai yang tidak kalah mempesona. Olehnya itu maka seharusnya sektor wisata juga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Di Kabupaten Sinjai juga terdapat lokasi wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah dan merupakan ikon kabupaten sinjai yaitu “Hutan Mangrove Tongke-tongke”.

Desa Tongke-Tongke di kenal secara nasional ketika pada tahun 1995 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto penghargaan di bidang lingkungan, Kalpataru diberikan kepada pemrakarsa hutan bakau (mangrove) pada masa orde baru. Sejak itu, nama Desa Tongke-tongke beserta hutannya mulai dikenal dan menjadi percakapan tingkat nasional sebagai contoh yang akan ditiru oleh wilayah pesisir lainnya di Indonesia.

Wisata hutan mangrove Tongke-tongke menjadi destinasi wisata andalan pemerintah Kabupaten Sinjai dan Sulawesi Selatan sejak pengelolaannya dialihkan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sinjai tahun 2017, secara bertahap kawasan hijau ini mulai dibenahi. Kemudian untuk mengoptimalkan kawasan wisata itu, pada tahun 2018 di ujicobakan menarik retribusi dengan karcis masuk seharga Rp5.000 per orang.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Seberapa besar kontribusi tempat wisata Hutan Mangrove Tongke-tongke terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor pariwisata Kabupaten Sinjai.

## Tinjauan Pustaka

### 1. Dasar-Dasar Penerimaan Pajak

Pada UU No.16 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan, pajak merupakan kewajiban kepada negara bagi setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa, namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara dan kemakmuran masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2016) pajak adalah pungutan yang dibebankan kepada masyarakat melalui kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Selain itu pajak juga merupakan alat untuk mengerakkan ekonomi yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat masyarakat. Pajak juga berfungsi sebagai kekuatan pendorong bagi kehidupan ekonomi individu. Dari perspektif hukum pajak, ini adalah masalah keuangan negara, sehingga diperlukan undang-undang pemerintah untuk mengatur masalah keuangan negara. Ini dilihat sebagai item yang agak signifikan dari perspektif keuangan pajak.

Menurut Mardiasmo (2016:27) fungsi pajak adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi *budgetair*, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pembanguana.
- b. Fungsi *regulerend*, pajak sebagai alat mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah meliputi pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha milik daerah, hasil pengelolaan aset daerah yang independen, dan

pendapatan asli daerah yang sah. (Bastian, 2010).

Menurut Mahmudi (2010) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan peningkatan kemandirian daerah yang berkaitan dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah untuk menghasilkan PAD, semakin besar kebijaksanaan daerah untuk menggunakan PAD sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Peningkatan PAD tidak hanya menjadi perhatian eksekutif tetapi juga legislatif karena ukuran PAD akan mempengaruhi struktur gaji anggota.

Sumber-sumber yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah yaitu :

1. Pajak daerah
2. Pajak Hotel
3. Pajak Restaurant dan Rumah makan
4. Pajak Hiburan
5. Pajak Reklame
6. Pajak Penerangan Jalan
7. Pajak Bahan Galian Golongan C
8. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Pemukiman.
9. Retribusi daerah.
10. Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan.
11. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Berikut adalah tabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai.

**Tabel**  
**Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Kabupaten Sinjai (2014-2018)**

TAHUN	JUMLAH
2014	Rp. 45.421.760.012
2015	Rp. 50.701.873
2016	Rp. 57.697.813
2017	Rp. 113.973.757
2018	Rp. 95.221.950

Sumber : *Badan Pusat Statistik (BPS)*

Tabel diatas Menunjukkan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai (2014-2018). Data tersebut menjelaskan bahwa pendapatan tahun

2014-2015 mengalami penurunan, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2016 dan 2017, kemudian data menunjukkan bahwa pendapatan di tahun 2018 kembali menurun di banding pendapatan sebelumnya yaitu tahun 2017. Sehingga dalam rentan waktu 2014-2018 data menunjukkan bahwa pendapatan tertinggi yaitu pada tahun 2014, sedangkan pendapatan terendah berada pada tahun 2015. Keseluruhan data pada tabel diatas memperlihatkan hasil yang tidak stabil atau bersifat fluktuatif.

Melihat hal tersebut, maka sangat diharapkan perhatian pemerintah Kabupaten Sinjai agar lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sinjai.

### 3. Pariwisata

Menurut Koen Meyers (2009), Pariwisata adalah pengalaman perjalanan yang berlangsung untuk sementara waktu dari tempat tinggal asli ke tujuan dengan tujuan untuk tidak menetap atau mencari nafkah tetapi untuk memuaskan minat, untuk menghabiskan waktu luang atau liburan dan tujuan lain. Secara umum, pariwisata adalah perjalanan yang ditempuh seseorang dari satu tempat ke tempat lain dengan perencanaan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu, tujuannya adalah untuk bersantai atau tertarik untuk memenuhi keinginannya. Atau pariwisata juga dapat didefinisikan sebagai perjalanan liburan dari satu tempat ke tempat lain, dan kemudian kembali ke lokasi semula. Kata pariwisata berasal dari bahasa *sanskerta*, yaitu “*pari* yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, keliling, dan *wisata* yang berarti perjalanan atau bepergian”. Oka A.Yoeti (Irawan, 2010)

Istilah pariwisata muncul setelah tahun 1960 yang menggantikan istilah bertamasya, melancong atau piknik yang masih dalam pengertian sederhana dan sempit yaitu bepergian ke suatu tempat yang tidak jauh untuk sekedar bersantai. Padahal esensi perjalanan yang dilakukan terkait dengan gerakan manusia di masa sekarang jauh lebih luas. Oleh karena itu pariwisata memberikan nilai ekonomi yang kuat untuk

penggunaan aset ini sebagai sumber daya komersial. Perjalanan wisata hendaknya memenuhi persyaratan yang di perlukan, yaitu;

- a. Bersifat sementara,
- b. Bersifat sukarela (*voluntary*) dalam arti tidak terjadi paksaan, Tidak bekerja yang bersifat menghasilkan upah ataupun bayaran.

#### 4. Obyek Wisata

Objek wisata adalah tujuan wisata, karena memiliki objek wisata alam dan buatan manusia seperti keindahan alam atau pegunungan, pantai flora dan fauna, kebun binatang, bangunan bersejarah kuno, artefak, landmark, kuil, tarian, atraksi dan budaya yang berbeda lainnya (Adisasmita, 2010).

Ridwan (2012) mengemukakan bahwa objek wisata adalah segala sesuatu yang memiliki ciri khas atau keunikan, keindahan serta nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, adat istiadat dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau destinasi kunjungan wisatawan.

Dalam UU No. 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa objek dan daya tarik wisata terdiri dari:

- a. Objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berupa keadaan alam, serta flora dan fauna.
- b. Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia seperti peninggalan sejarah, museum, agro wisata, wisata tirta, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan.

Secara garis besar, bahwa ada potensi luar biasa dalam pengembangan dan pembangunan objek wisata di daerah yang memiliki kondisi regional. Dengan kondisi spesifik kawasan itu, tempat-tempat wisata yang tersedia sangat berbeda. Begitu pula dengan Kabupaten Sinjai yang memiliki potensi wisata yang luar biasa. Akibatnya, semakin banyak tempat wisata yang ada dan peningkatan kualitas objek wisata yang tersedia diharapkan dapat meningkatkan sektor pariwisata Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai.

#### 5. Retribusi Obyek Wisata

Retribusi pariwisata adalah jenis pungutan yang dilakukan pada lokasi pariwisata atas penggunaan fasilitas dan pemberian izin penempatan pedagang oleh pemerintah kabupaten/kota. Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2009 Retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pada Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan menyebutkan bahwa Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah
  - a. Hasil Pajak Daerah.
  - b. Hasil Retribusi Daerah.
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
  - d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
2. Pendapatan transfer.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

#### METODE PENELITIAN

##### Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana akan lebih banyak diuraikan hasil penelitian (Observasi dan studi dokumentasi) secara deskriptif. Data yang telah diperoleh akan diolah dan dianalisis secara kualitatif.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Potensi Pariwisata Kabupaten Sinjai

Pembangunan sektor pariwisata ditujukan untuk meningkatkan peran sektor pariwisata dalam kegiatan ekonomi yang dapat membuka lapangan kerja guna meningkatkan pendapatan warga negara dan penghasil devisa. Upaya Pemerintah adalah melalui penciptaan dan eksploitasi berbagai potensi wisata nasional. Ada beberapa kemungkinan objek wisata di Sulawesi Selatan, yang juga merupakan salah satu tempat wisata di wilayah

Indonesia, terutama di Kabupaten Sinjai, dan tentunya sangat berpengaruh dalam hasil ekonomi Kabupaten Sinjai.

Kabupaten Sinjai adalah tujuan wisata yang diminati wisatawan lokal. Sektor pariwisata memiliki kemampuan untuk berkontribusi atau memperdagangkan mata uang asing ke ekonomi, kontribusi

ditentukan oleh banyaknya jumlah wisatawan yang mengunjungi situs wisata. Berikut tabel Jumlah Fasilitas Rekreasi Menurut Jenis di Kabupaten Sinjai tahun 2018.

**Tabel**

**Jumlah Fasilitas Rekreasi Menurut Jenis di Kabupaten Sinjai Tahun 2018**

Kecamatan	Obyek Wisata Alam Dan Buatan	Obyek Wisata Budaya Dan Sejarah	Obyek Wisata Bahari	Obyek Wisata Minata Khusus
Sinjai Barat	4	4	-	2
Sinjai Borong	3	1	-	1
Sinjai Selatan	2	7	-	4
Tellu Limpoe	4	-	3	1
Sinjai Timur	6	12	4	1
Sinjai Tengah	2	18	-	-
Sinjai Utara	3	14	1	1
Bulupoddo	1	8	-	1
Pulau Sembilan	1	3	5	1
<b>JUMLAH</b>	<b>26</b>	<b>67</b>	<b>13</b>	<b>12</b>

Sumber : badan Pusat Statistik (BPS)

Jumlah destinasi wisata menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila dikelola dengan baik, namun di Kabupaten Sinjai tidak semua objek wisata dikelola dengan baik sehingga tidak semua tempat wisata memiliki tarif retribusi untuk masuk di kawasan tersebut. Tabel diatas menggambarkan banyaknya jumlah fasilitas rekreasi yang ada di Kabupaten sinjai yaitu sebanyak 118 tempat rekreasi, kebanyakan diantaranya adalah Obyek Wisata Sejarah dan Budaya yaitu sebanyak 67 tempat

rekreasi. Potensi ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembang destinasi wisata yang sudah ada, agar disamping bisa menjadi sumber pendapatan juga bisa membuat obyek-obyek bersejarah tersebut dapat terpelihara dengan baik.

Disamping itu pemerintah daerah seharusnya mengalokasikan anggaran untuk membangun infrastruktur ke lokasi destinasi wisata.

**Tabel**

**DATA KUNJUNGAN WISATAWAN TAHUN 2017**

URAIAN	DEWASA	ANAK-ANAK	TOTAL
Batu Pake Gojeng Sinjai Utara	16529	3400	19929
Air Terjun Lembang Saukang Tellulimpoe	627	0	627
Tahura Sinjai Borong	200	0	200
Air Terjun Kembar Sinjai Borong	1445	0	1445
Hutan Mangrove Tongke-tongke	3300	800	4100
<b>JUMLAH</b>	<b>22101</b>	<b>4200</b>	<b>26301</b>

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2017 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Sinjai mengkategorikan data kunjungan wisatawan berdasarkan usia yang dimana pengunjung dewasa sebanyak 22.101 orang dan pengunjung anak-anak sebanyak 4.200 orang, sehingga tercatat bahwa pada tahun

2017 jumlah pengunjung obyek wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai adalah sebanyak 26.301 pengunjung yang kebanyakan dikategorikan dalam usia dewasa.

**Tabel**  
**DATA KUNJUNGAN WISATAWAN TAHUN 2018**

URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
Batu Pake Gojeng Sinjai Utara	8250	7750	16000
Air Terjun Lembang saukang Tellulimpoe	179	200	379
Tahura Sinjai Borong	3495	4105	7600
Air Terjun Kembar Sinjai Borong	955	1272	2227
Hutan Mangrove Tongke-tongke Sinjai Timur	23793	34607	58400
<b>JUMLAH</b>	<b>36672</b>	<b>47934</b>	<b>84606</b>

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Sinjai

Jika tabel data kunjungan wisatawan tahun 2017 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai mengkategorikan pengunjung berdasarkan usia, namun lain halnya pada tahun 2018, Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten sinjai mengkategorikan data kunjungan wisatawan pada obyek wisata berdsarkan jenis kelamin yang dimana jumlah pengunjung pada tahun 2018 sebanyak 84.606 orang, komposisinya terdiri dari 36.672 pengunjung laki-laki dan 47.934 pemgunjung perempuan. Data tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2018 obyek wisata lebih ramai dikunjungi oleh pengunjung berjenis kelamin

perempuan dibandingkan berjenis kelamin laki-laki.

### Hasil Pengolahan Data

Hasil penelitian penggambaran tentang hasil yang diperoleh yakni data retribusi wisata Hutan Mangrove Tongke-tongke dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata Kabupaten Sinjai dari tahun 2017 sampai tahun 2018 dengan hasil olahan sebagai berikut :

$$\text{Share} = \frac{\text{Pajak Retrbusi wisata hutanmangrove tongke-tongke}}{\text{Pendapatan Asli Daerah (Sektor Pariwisata)}} \times 100\%$$

**Tabel**  
**HASIL ANALISIS KONTRIBUSI WISATA HUTAN MANGROVE TONGKE-TONGKE TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SEKTOR PARIWISATA**

Tahun	Retribusi Wisata Hutan Mangrove Tongke-tongke	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata (Objek wisata)	Kontrbusi
2017	18.900.000	73.425.500	25,7 %
2018	279.400.000	402.064.000	69,4 %

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai (Data Diolah).

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi wisata hutan mangrove Tongke-Tongke terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata di Kabupaten Sinjai tahun 2017 sebesar 25,7 %, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 69,4 %. Kontribusi hutan mangrove Tongke-Tongke terhadap pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018 dengan selisih sebesar 43,7 %.

## Pembahasan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi wisata hutan mangrove Tongke-Tongke terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata di Kabupaten Sinjai memiliki potensi cukup tinggi. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 69,4% sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 25,7%. Dengan melihat hasil analisis ini menunjukkan bahwa peranan retribusi objek wisata hutan mangrove tongke-tongke terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata di Kabupaten Sinjai memiliki potensi sangat besar karena kontribusi pendapatan sektor wisata hutan mangrove Tongke-Tongke mengalami peningkatan dalam satu tahun terakhir..

Dengan potensi pariwisata yang cukup baik di Kabupaten Sinjai dan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka diharapkan pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan semakin meningkat pula.

Retribusi memiliki fungsi dan peranan yang sangat besar terhadap pelaksanaan penerapan otonomi daerah guna merealisasikan pendapatan asli daerah. Penerimaan retribusi akan memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi PAD Sektor pariwisata di Kabupaten Sinjai terbilang masih rendah pada tahun 2017 yaitu sebesar 25,7%. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kontribusi wisata hutan mangrove Tongke-Tongke terhadap

pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata membuahkan hasil pada tahun 2018 karna mengalami peningkatan sebesar 43,7% dari tahun sebelumnya, di mana wisata hutan mangrove Tongke-Tongke pada tahun 2018 berkontribusi 69,4% terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata di Kabupaten sinjai.

## SARAN

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Sinjai untuk melakukan pembenahan destinasi wisata dan infrastruktur pendukungnya serta menjamin dan memastikan semua potensi penerimaan pajak wisata telah terkumpul dan tercatat dalam sistem akuntansi Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian dan pengawasan yang memadai untuk menjamin dipatuhinya aturan, prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.
2. Pemerintah Daerah perlu melakukan verifikasi tentang penerimaan retribusi wisata dalam kas pemerintah daerah dan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap petugas dilapangan. Begitu juga terhadap masyarakat yang tidak membayar dan menegakkan *reward* dan *punishment* sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Pemerintah Daerah harusnya lebih memperhatikan dan mengembangkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Sinjai guna lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## DAFTAR PUSTAKA

- Subagyo. 2012. Aspek Hukum Dalam Ekonomi, Jilid I. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.
- Alfitri. (2011). *Community Development :Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.



- World Economic Forum, W. (2015). *The Travel & Tourism*. Geneva: World Economic Forum.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Indra Bastian. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Ed. 3. Jakarta : Erlangga.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga.
- Koen Meyers. (2009). *Pengertian Pariwisata*. Diakses 17 Februari 2019, dari <http://assharrefdino.blogspot.com/2013/11/pengertian-pariwisata-menurut-para-ahli.html>.
- Irawan. (2010). *Potensi Obyek Wisata Sebagai Daya Tarik Wisata*. Yogyakarta : Kertas Karya
- Adisasmita, (2010). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Hermansyah Fakhru Indra. (2017). *Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin. 2017.
- Mappong, Suriani. (2019). Meniti Tongke-Tongke Menjadi Magnet Sinjai, <https://www.mongabay.co.id/2019/07/10/meniti-tongke-tongke-jadi-magnet-sinjai/>, diakses tanggal 2 Januari 2020.
- Ridwan. (2012). *Perencanaan dan Pengembangan pariwisata*. PT SOFMEDIA : Medan.
- Suyanto, Pasca Putri Lopian Ayu Intansari dan Supeni Endahjati. (2016). "Tax Amnesti".
- Undang-Undang No. 23 Tahun (2014) tentang Pemerintah Daerah Pajak Daerah.
- Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Wulandari, Tika, dan Suyanto. (2014). "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan". *Jurnal Akuntansi, Vol.2, No.2, Desember 2014. Jurnal Akuntansi, Vol.4, No.2, Desember 2016*.